

Ulama Sampaikan Soal Sistem Pemilu Harapan Masyarakat kepada Mahfud MD



Menko Polhukam, Maffud MD, didampingi Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Dr Herman Fithra tiba di Gedung Serba Guna PT Perta Arun Gas di Lhokseumawe, Ahad (11/6/2023). Menko Polhukam berdialog dengan tokoh masyarakat Aceh. Foto: Bustami Ibrahim.

UNIMALNEWS | Lhokseumawe – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Mahfud MD, berdialog dengan tokoh masyarakat dan Forkopimda dari 23 kabupaten/kota di Gedung Serba Guna PT Perta Arun Gas, Lhokseumawe, Ahad (11/6/2023) malam. Dalam kegiatan tersebut, dua ulama asal Aceh Utara menyampaikan soal sistem pemilu proporsional terbuka yang menjadi harapan masyarakat dibandingkan dengan sistem tertutup.

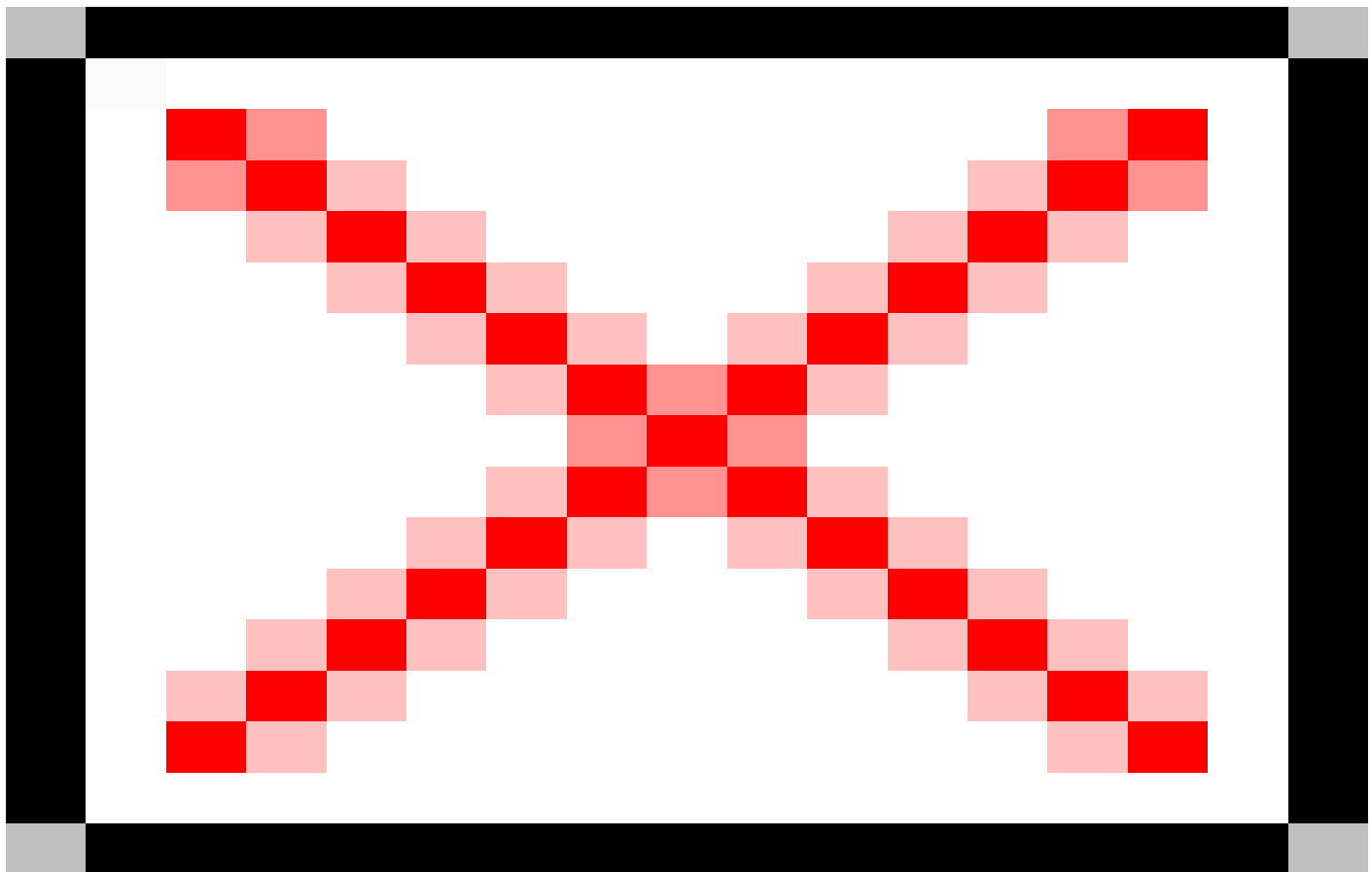
Ulama mengharapkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabaikan ekspektasi masyarakat dibandingkan dengan memenuhi keinginan lima orang yang menggugat sistem tersebut.

“Ada delapan partai politik yang menginginkan sistem pemilu dilakukan dengan proporsional terbuka. Masyarakat juga ingin dengan sistem yang terbuka. Hanya lima orang yang menginginkan tertutup. Kalau MK kemudian memutuskan tertutup, maka mengabaikan aspirasi masyarakat luas,” ungkap anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, Tgk Samsul Bahri. Ia mengharapkan keputusan MK nanti sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia yang menginginkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka tetap dipertahankan.

Hal senada disampaikan ulama Aceh Utara lainnya, Tgk Teuku Zulfadli Ismail. Ia juga mengingatkan pihak pengaman ada di tempat ketika penghitungan dan rekapitulasi suara sehingga tidak ada kecurangan.

Selain soal sistem pemilihan, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Utara, Fadli, juga melaporkan proyek Waduk Keureuto yang menjadi tumpuan pertanian masyarakat bisa dilanjutkan. Begitu juga dengan Bendungan Krueng Pase yang belum selesai dibangun.

“Menurut info sedang mandek pembangunannya. Memang ini bukan di bawah Kementerian Pak Mahfud, tapi bisa disampaikan kepada Bapak Presiden,” ujar Fadli yang juga mengingatkan soal jaringan internet yang belum merata di Kabupaten Aceh Utara.



Menanggapi pertanyaan para ulama, Mahfud menyebutkan bagi Pemerintah atau bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu terbuka atau tertutup tidak jadi masalah. “Tapi bagi partai, itu jadi masalah. Ada delapan partai ingin terbuka, dan ada satu yang tertutup. Ada soal prinsip ada soal teknis. Bagi KPU hanya soal teknis,”

Tanggal: 11 June 2023

Post by: [ayi](#)

Kategori: [News](#),

Tags: [Unimal](#), [Lhokseumawe](#), [Unimal Hebat](#), [Dies Natalis](#),